

Pancasila dalam Pembangunan Sosial Budaya

BABARI dan SUKANTO*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan pada landasan Idiil Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945. Ini berarti bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan usaha sadar masyarakat bangsa Indonesia untuk merealisasi nilai dan norma-norma Pancasila sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam konstitusi kita, yaitu UUD 1945 di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu melalui pelaksanaan pembangunan nasional ini bangsa Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan-kemajuan lahiriah semata seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan sebagainya tetapi juga kemajuan-kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan lain-lainnya.

Kemajuan lahiriah dan batiniah harus dicapai secara bersama-sama sehingga terciptalah keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara keduanya. Prinsip ini akan memberikan keyakinan pada masyarakat bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan terwujud apabila terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan masyarakat bangsanya, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan Tuhannya. Selain itu pembangunan nasional ini harus merata di seluruh wilayah tanah air dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan satu golongan atau sebagian masyarakat tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang berupa perbaikan tingkat kesejahteraan hidup yang berkeadilan sosial. Ini merupakan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa kita.

*Staf CSIS.

Berdasarkan pada pandangan-pandangan itu maka sikap hidup setiap manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan nasional ini harus menyadari bahwa dirinya adalah sebagai individu yang sekaligus anggota masyarakat bangsa. Oleh karena itu ia harus mampu menempatkan kepentingan pribadinya dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Ia harus lebih mengutamakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat daripada menuntut hak-hak pribadinya. Dengan cara ini ia dapat menikmati hidup sebagai manusia yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kodratnya sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dengan demikian ia akan mampu ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat bangsanya.

Pembangunan sosial budaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional pada umumnya. Pembangunan sosial budaya mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia modern berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat Indonesia yang adil-makmur baik lahiriah maupun batiniah, dengan anggota masyarakatnya yang bersifat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, trampil, berbudipekerti luhur, dan berkepribadian Indonesia. Ini berarti membentuk manusia Indonesia yang mampu membangun dirinya dan masyarakat bangsanya. Oleh karena itu sasaran pembangunan sosial budaya meliputi upaya untuk (1) mengembangkan warisan kebudayaan Indonesia yang luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipadukan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan nilai-nilai universal manusia modern, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ini bermuara pada pembentukan sikap dan selanjutnya terwujud dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari dalam masyarakat; (2) mengembangkan kondisi kehidupan masyarakat yang mendorong pelembagaan nilai dan norma yang ingin ditumbuhkan itu baik bagi manusia secara perorangan maupun bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Ini berarti pengembangan sosial budaya bermaksud mengembangkan kreativitas manusia Indonesia sebagai pelaku secara sosial dan budaya sesuai dengan martabat dan tanggung jawab etisnya. Pengembangan sosial budaya memberikan makna manusiawi pada pembangunan nasional. Inilah esensi sesungguhnya dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

REFLEKSI PANCASILA DALAM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Pembangunan sosial budaya meliputi banyak sektor dan bersifat non-ekonomis. Maksudnya investasi yang ditanamkan di sektor pengembangan sosial budaya tidak dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis dalam waktu yang singkat. Dari banyak sektor itu dalam tulisan ini kami hanya memilih dan menguraikan beberapa sektor saja. Sektor itu meliputi kebudayaan, pendidikan, dan beberapa sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan

hidup masyarakat bangsa Indonesia. Melalui sektor-sektor ini kami mencoba untuk melihat sampai sejauh mana pembangunan sosial budaya ini telah turut berperan dalam mengembangkan dan mengamalkan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila seperti yang telah dijabarkan dalam Eka Prasetya Pancakarsa (P-4) di dalam kehidupan masyarakat bangsa kita. Di samping itu tulisan ini akan memusatkan perhatiannya pada sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat atau kelompok masyarakat. Apakah dalam hubungan antarkelompok masyarakat ini sikap dan perilaku kita telah dijiwai oleh nilai dan norma-norma Pancasila. Sikap diartikan sebagai kesiagaan mental atau syaraf yang terbina melalui pengalaman yang memberikan pengarahannya atau pengaruh terhadap bagaimana seseorang menanggapi segala macam objek atau situasi yang dihadapinya.

Perhatian terhadap sikap dan perilaku ini perlu mengingat kemajemukan masyarakat bangsa kita berdasarkan suku, agama, ras, kelompok kepentingan maupun berbeda dalam faham golongan. Dalam berbagai perbedaan yang ada di antara kita, kita mempunyai tekad yang sama untuk tetap menegakkan kesatuan dan persatuan hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tekad itu maka terjadilah interaksi sosial, yaitu hubungan yang terjalin antara dua atau lebih individu maupun di antara kelompok-kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi sehingga mampu mengubah atau memperbaiki kelakuan individu/kelompok yang lain atau sebaliknya. Semua itu terjadi karena kesadaran dan keinginan bersama untuk tetap hidup bersama sebagai warga negara bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsanya.

KEBUDAYAAN NASIONAL

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki berbagai ragam kebudayaan daerahnya dan yang terikat dalam suatu kesatuan berdasarkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Berdasarkan semboyan ini maka unsur-unsur kebudayaan daerah menjadi modal utama bagi pembentukan satu kebudayaan nasional. Dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara ini maka proses penyatuan kebudayaan daerah ke dalam kebudayaan nasional harus berjalan secara alamiah dan wajar. Melalui proses seleksi yang bersifat alamiah ini maka unsur-unsur kebudayaan daerah yang mampu menjadi cermin cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia seluruhnya dapat diterima menjadi unsur kebudayaan nasional.

Usaha mengembangkan kebudayaan nasional yang mengarah kepada satu kesatuan budaya yang diterima oleh masyarakat bangsa terwujud dalam konsep *Wawasan Nusantara* yang memandang kepulauan Nusantara sebagai satu

kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pelaksanaan konsepsi Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya harus berpedoman pada pendapat yang mengatakan bahwa unsur kebudayaan daerah harus mendapat hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama untuk memperkaya kebudayaan nasional kita.

Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional harus bersumber pada nilai dan norma-norma Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya harus mengekspresikan nilai dan norma Pancasila. Apabila semua manusia Indonesia telah mampu melaksanakan hal itu maka akan terwujud satu pola pergaulan antarsesama manusia Indonesia yang bersumberkan pada moral Pancasila. Hal ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia akan menutup dirinya dari pengaruh kebudayaan yang lain. Kebudayaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini bersifat terbuka. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia tidak menolak nilai dan norma baru dari kebudayaan asing yang mampu memperkaya dan mengembangkan kebudayaan kita dan yang mampu mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dalam proses interaksi kebudayaan antarbangsa ini kita harus mampu menempatkan nilai dan norma Pancasila sebagai jiwa kebudayaan bangsa Indonesia menjadi *filter*nya. Maksudnya, kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk ke tanah air Indonesia. Bangsa kita hanya menerima unsur-unsur yang positif sesuai dengan kebutuhan kita sebagai bangsa sedang membangun dan yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa. Unsur-unsur positif yang perlu kita terima dan kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat kita adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kualitas manusia yang menekuni bidang-bidang itu sebagai profesinya. Peningkatan kemampuan profesional bangsa kita perlu dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain sehingga kita mampu mensejajarkan diri kita dengan bangsa-bangsa lain itu, terutama bangsa yang telah maju teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuannya. Sikap yang menjadi penopang utama dari perkembangan profesionalisme ini adalah disiplin, kemauan dan kemampuan untuk kerja keras sehingga perlu ditumbuhkan di dalam kehidupan masyarakat bangsa kita.

Sedangkan unsur-unsur negatif dalam proses penetrasi kebudayaan asing terutama yang mampu memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan negara bangsa kita yang sedang membangun ini harus kita tolak. Penetrasi kebudayaan asing yang membawa serta pengaruh-pengaruh negatif terutama yang menyangkut masalah ideologis, gaya hidup, dan norma-norma moral yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa harus sedini mungkin dideteksi dan dicari tata cara untuk menangkalnya.

Agar kita mampu menghadapi penetrasi kebudayaan asing yang bersifat mendasar ini maka kita perlu mengembangkan daya tangkal yang bersifat konseptual dalam diri kebudayaan nasional kita. Untuk itu pembudayaan nilai dan norma hidup Pancasila perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar nilai dan norma Pancasila itu tidak diterima sebagai nilai dan norma yang berasal dari luar tetapi tumbuh dan berkembang dari dalam setiap diri manusia Indonesia. Oleh karena itu P-4 sebagai salah satu sarana pengembangan nilai dan norma Pancasila harus berperan sebagai sarana pembudayaan dan pemasyarakatan nilai dan norma-norma itu ke dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti melalui P-4 kita menanamkan nilai dan norma-norma Pancasila ke dalam masyarakat. Hasil yang ingin diperoleh dari proses ini adalah sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma itu. Semakin kuat nilai dan norma-norma Pancasila terungkap dalam sikap dan perilaku hidup masyarakat kita sehari-hari akan berarti semakin mantap proses pembudayaan dan pemasyarakatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Namun demikian, dewasa ini ada kesan bahwa proses penataran P-4 hanya menjadi forum tatap-muka antara para manggala (penatar) dengan para petatar. Bahan yang dibicarakan adalah tentang UUD 1945, Pancasila, P-4, dan GBHN. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi di antara petatar yang dihadiri oleh para manggala. Kemudian petatar membawakan sebuah pidato yang temanya telah ditentukan oleh BP-7. Metode yang dipakai adalah "objektif praktis." Berdasarkan pada metode ini maka para manggala dalam pembicaraan tidak berani keluar dari bahan yang telah disediakan baginya. Semua pembicaraan baik oleh manggala maupun oleh petatar harus tetap bersumber pada referensi yang ada. Dengan cara seperti ini maka forum tatap-muka (penataran) itu tidak dapat mempengaruhi apalagi mengubah sikap dan perilaku para petatar untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila seperti yang tertuang dalam 36 butir P-4 itu. Ini berarti melalui forum penataran P-4 itu kita baru mampu memperkenalkan nilai dan norma-norma Pancasila kepada petatar dan belum secara sungguh-sungguh berusaha untuk menanamkan nilai dan norma-norma itu. Oleh karena itu mungkin sudah saatnya kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penataran P-4 itu.

Forum penataran P-4 itu harus menjadi forum sosialisasi dan komunikasi nilai dan norma-norma Pancasila yang mampu menyadarkan para petatar akan kebaikan nilai dan norma-norma itu sehingga timbul kepercayaan terhadapnya dan selanjutnya tentu akan berusaha mewujudkan dalam sikap dan perilaku hidupnya. Tentu kondisi kehidupan dalam masyarakat perlu ditata sedemikian rupa sehingga sikap dan perilaku yang berdasarkan pada nilai dan norma Pancasila itu dapat tumbuh dan berkembang. Pemegang peran utama

dalam menata kondisi kehidupan masyarakat adalah para pemimpin masyarakat dalam arti yang luas. Maksudnya, pemimpin formal maupun yang informal. Mereka merupakan figur panutan bagi para pengikutnya. Oleh karena itu setiap orang yang merasa dirinya pemimpin harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari perbuatan (sikap dan perilaku) tercela, yaitu sikap dan perilaku hidup yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila. Bagi para pemimpin formal perbuatan tercela itu dapat disebutkan antara lain korupsi, menyalahgunakan jabatan, nepotisme, dan tidak menampilkan diri dalam kegiatan sehari-hari sebagai abdi rakyat.

Penataran P-4 bagi para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal juga merupakan upaya untuk menyadarkan mereka agar dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila. Hal ini antara lain terpancar dalam sikap hidup yang meletakkan kepentingan pribadinya dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakatnya, dan menyadari sepenuhnya bahwa melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan dirinya sendiri. Hal ini menuntut kemauan dan kemampuan semua manusia Indonesia untuk mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat bangsa Indonesia yang sedang membangun ini.

Mengingat kemampuan dan kemauan kita untuk mengendalikan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela masih relatif kurang maka perlu dikembangkan budaya pengawasan, sikap hidup disiplin, pola hidup sederhana, menghargai orang bukan karena status tetapi prestasi, dan semangat kerjasama (koordinasi). Semua hal itu akan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup kita apabila kita telah mampu menempatkan nilai dan norma-norma Pancasila sebagai pedoman dan penuntunnya. Nilai dan norma Pancasila harus menjadi sumber moral bagi sikap dan perilaku kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Inilah sasaran pelaksanaan penataran P-4.

PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan merupakan sarana formal untuk membentuk manusia Indonesia yang bersifat utuh, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, trampil, berbudi luhur, berkepribadian Indonesia, dan mampu membangun dirinya sendiri dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dari rumusan ini terdapat dua dimensi utama dari pendidikan, yaitu pendidikan keilmuan untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan trampil dalam arti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menekuninya (profesi); dan pendidikan humaniora untuk membentuk manusia yang takwa,

berbudi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia. Dari sisi ini terlihat bahwa lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan, yaitu tempat pertumbuhan dan pengembangan nilai dan norma-norma baru. Nilai dan norma-norma baru ini disosialisasikan melalui proses belajar-mengajar sehingga semuanya akan terwujud dalam sikap dan perilaku pendidik dan peserta didik. Nilai-nilai dan norma baru itu harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar-belajar guru dan peserta didik. Oleh karena itu output dari suatu proses mengajar-belajar yang baik adalah peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan (kognitif), mengekspresikan dalam sikap (afektif), dan mampu mewujudkan dalam karya nyata (psiko-motorik). Dari fungsi ini terlihat bahwa pendidikan merupakan sarana pembudayaan manusia.

Pendidikan keilmuan bertujuan membentuk keahlian seseorang, sedangkan pendidikan humaniora bertujuan membentuk manusia budaya. Esensi dari pendidikan keilmuan adalah pengembangan kemampuan berpikir secara konseptual. Oleh karena itu pendidikan keilmuan harus diarahkan kepada penguasaan metodologis dan bukan hanya penguasaan tubuh pengetahuan yang teoritis semata. Oleh karena itu perangkat keilmuan seperti bahasa, logika/matematika, dan statika perlu diberikan dalam semua jenjang pendidikan. Namun demikian peningkatan kecerdasan di bidang keilmuan harus sejajar dengan peningkatan di bidang lain seperti keagamaan, budi pekerti, moral, dan kesenian. Dengan demikian terlihat bahwa seluruh pengetahuan ini bersifat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pendidikan keilmuan dan pendidikan humaniora ini akan berpadu dalam diri manusia.

Pendidikan keilmuan yang dilaksanakan secara baik dan benar dalam proses belajar-mengajar bukan hanya akan menghasilkan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi semata tetapi juga pribadi manusia yang terbuka, kritis, objektif, sistematis, dan sikap toleransi sesuai dengan proses berpikir keilmuan. Sedangkan di bidang penguasaan teknologi kita harus berusaha sedini mungkin untuk menghindari pengaruh dari pemakai teknologi yang membawa dehumanisasi. Dari sisi ini terlihat bahwa pendidikan keilmuan dan pengembangan teknologi juga membentuk sikap dan watak manusianya. Inilah titik-singgung antara pendidikan keilmuan dan pendidikan humaniora dengan tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia ahli yang berbudaya.

Manusia ahli dan berbudaya ini akan mampu menjalankan peranannya sesuai dengan fungsi dan profesinya di dalam masyarakat. Dewasa ini ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kegiatan di bidang profesi tidak hanya mensyaratkan penguasaan teknis keahlian semata tetapi juga pembentukan

watak keprofesian seperti jujur, disiplin, rela bekerja keras, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan kemampuannya oleh masyarakat.

Di samping itu keluarga dan masyarakat juga memegang peran yang penting dalam proses pendidikan, terutama pendidikan budi pekerti yaitu menanamkan nilai dan norma-norma hidup bersama dalam masyarakat. Sekolah hanya membantu mengembangkannya lebih lanjut. Namun dalam kenyataan sekarang semua tugas itu dibebankan kepada sekolah. Para orangtua di rumah selain sibuk dalam tugasnya juga tidak mampu melaksanakan pendidikan budi pekerti kepada anak-anaknya secara sistematis. Oleh karena itu di masa yang akan datang peran orangtua di rumah untuk memberikan pendidikan budi pekerti dan pembentukan watak bagi anak-anaknya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Masyarakat sebagai tempat sosialisasi diri di luar lingkungan keluarga dan sekolah perlu ditata sedemikian rupa sehingga suasana kehidupan para anggotanya dalam arti sikap dan perilaku mereka sesuai dengan nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsanya. Peran para pemuka masyarakat baik yang formal maupun informal turut menentukan dalam proses ini. Mereka adalah orang-orang yang harus tampil untuk merekayasa suasana kehidupan masyarakat sekitarnya. Untuk itu mereka harus terlebih dahulu menghayati, mengerti, dan mengamalkan dalam sikap dan perilaku nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Mereka harus menempatkan diri sebagai pribadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan penataran bagi para pemuka masyarakat di lingkungan masyarakat desa merupakan langkah yang tepat dan perlu dilanjutkan pelaksanaannya.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga keagamaan, kepemudaan (KNPI, AMPI, Karang Taruna, Pramuka), LKMD, dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya juga merupakan wadah pendidikan dan pengembangan nilai dan norma-norma hidup bagi para anggotanya. Oleh karena itu lembaga-lembaga itu dapat juga menjadi sarana sosialisasi dan komunikasi nilai dan norma-norma Pancasila. Kenyataan yang terlihat dewasa ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan itu belum melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi nilai dan norma Pancasila ini meskipun mereka telah menerima Pancasila sebagai dasarnya. Asas Pancasila yang diterima dan dipakai oleh semua lembaga kemasyarakatan itu tidak ada artinya kalau lembaga-lembaga itu tidak mengoperasionalisikannya secara konkret dalam bentuk sikap dan perilaku para anggotanya.

Dari semua uraian itu terlihat bahwa pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan juga sekaligus berperan sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi nilai dan norma-norma hidup dalam masyarakat dalam hal ini Pancasila. Nilai dan

norma-norma ini perlu ditumbuhkembangkan melalui sikap dan perilaku hidup setiap anggota masyarakat, lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan di seluruh wilayah tanah air. Apabila harapan ini pada saatnya dapat terwujud maka terjadilah pembudayaan Pancasila dalam bernegara bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa telah benar-benar menjadi pedoman dan penuntun sikap dan perilaku warga negara bangsa Indonesia.

Namun demikian dalam proses untuk mewujudkan harapan itu kita masih perlu menghadapi tantangan-tantangan. Yang dimaksudkan dengan tantangan adalah faktor yang menyebabkan proses pembudayaan Pancasila melalui sarana pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah belum memberikan hasil yang memuaskan, yaitu berupa sikap dan perilaku warga negara anggota masyarakat bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Tantangan di bidang pendidikan ini antara lain terlihat dalam (1) perdebatan di antara kaum intelektual kita tentang isi kurikulum pendidikan nasional kita. Masalah yang diperdebatkan adalah manakah yang perlu mendapat bagian terbanyak dalam kurikulum pendidikan kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi ataukah humaniora? Padahal kalau kita mengamati secara teliti tujuan pendidikan nasional kita terlihat bahwa keduanya, perlu mendapat tempat yang seimbang dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat dan jenis sekolah; (2) hingga saat ini kita belum mampu menjadikan sekolah dan kampus-kampus sebagai pusat-pusat pengembangan kebudayaan. Kita baru mampu menjadikannya sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan dan pengetahuan humaniora di antara pendidik/pengajar dengan peserta didik. Hal ini terlihat dalam penggunaan metode ceramah yang sangat dominan dalam proses mengajar-belajar di samping kemampuan guru untuk berimprovisasi kurang sehingga sangat menggantungkan diri pada bahan yang tertulis dalam buku-buku pegangan. Kenyataan ini juga terlihat di kalangan para manggala selama pelaksanaan penataran P-4; (3) para pendidik/pengajar, orangtua di rumah, dan pemuka masyarakat tidak menempatkan diri mereka sebagai pribadi teladan dalam arti menampilkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila sehingga dapat menjadi contoh dari peserta didik atau anggota masyarakat lainnya; (4) hingga saat pemikiran bahwa penataran P-4 yang diberikan kepada para mahasiswa baru dapat menggantikan mata kuliah ideologi negara di tingkat perguruan tinggi masih terus berkembang. Padahal mata kuliah ideologi negara memiliki materi yang lebih luas dan lebih dalam daripada materi Pancasila yang diberikan melalui penataran P-4. Rupanya pemerintah perlu memberikan keputusan yang tegas yang isinya bahwa penataran P-4 bagi mahasiswa baru tidak dimaksudkan untuk menggantikan mata kuliah ideologi negara. Dengan sikap ini keraguan yang dewasa ini masih terasa di perguruan tinggi dapat hilang.

PANCASILA DALAM INTEGRASI SOSIAL

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, atau lebih tepatnya adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Terjadinya masyarakat Indonesia dalam wujudnya yang sekarang ini melalui proses yang amat panjang. Semula, ikatan setiap kelompoknya sangat erat, tetapi sebaliknya kesalingtergantungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya sangat rendah. Struktur masyarakatnya ditandai oleh dua ciri utama yang memiliki perbedaan-perbedaan sangat tegas. Secara horisontal, ia ditandai oleh kenyataan-kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda satu sama lainnya, baik karena perbedaan suku, adat, kedaerahan, agama, kepercayaan, maupun karena perbedaan ras. Secara vertikal, seperti setiap masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia juga terdiri dari banyak lapisan sosial. Lagi pula, setiap kesatuan sosial masih terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok sosial, yang masing-masing kelompok memiliki sub-kebudayaan sendiri-sendiri yang juga berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, secara relatif seringkali terjadi konflik antara kelompok sosial yang satu dan kelompok sosial yang lain. Bahkan perbedaan-perbedaan itu seringkali dipertajam oleh kaum penjajah untuk melestarikan penjajahannya di bumi Nusantara.

Seirama dengan perkembangan zaman, yaitu terutama dengan semakin banyaknya jumlah warga kesatuan sosial, semakin terbatasnya daya dukung lingkungan hidupnya dan semakin majunya alat angkutan antardaerah dan pulau, maka interaksi antara kesatuan-kesatuan sosial pun semakin tinggi frekuensinya. Setelah Kebangkitan Nasional, perbedaan-perbedaan tersebut jalin-menjalin membentuk kesatuan-kesatuan sosial yang lebih besar, berupa golongan-golongan, kelompok-kelompok kepentingan dan partai-pratai politik. Perbedaan suku tidak lagi jatuh berhimpitan dengan perbedaan adat, kedaerahan, agama, kepercayaan, dan pelapisan sosial. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari suku yang berbeda-beda, dapat bersama-sama menjadi anggota golongan, kelompok kepentingan atau partai politik yang sama, dan demikian pula sebaliknya. Dalam pada itu, mereka yang berbeda suku dan agama, juga tidak dengan sendirinya memiliki perbedaan daerah dan pelapisan sosial yang menjadi identifikasi dirinya.

Proses integrasi sosial tersebut berjalan terus dan semakin lancar, terutama karena walaupun kesatuan-kesatuan sosial tersebut memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda, akan tetapi dalam kesatuan-kesatuan sosial tersebut juga terdapat nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai tersebut benar-benar berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup para warganya. Di antara nilai-nilai tersebut adalah rasa hormat dan taat terhadap Tuhan, asal dan tujuan segala sesuatu. Ini terlihat dengan banyaknya tempat sesaji, candi, kuil, kelenteng, mesjid, gereja dan tempat-tempat pemujaan Tuhan

lainnya. Mereka menganut agama dan menghayati kepercayaannya masing-masing dalam suasana toleransi dan kerukunan. Perikémanusiaan dijunjung tinggi seperti terungkap dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, serta hidupnya sikap yang memperlakukan sesamanya seperti orang ingin diperlakukan oleh orang lain. Semangat persatuan juga terdapat dalam kesatuan-kesatuan sosial, yaitu terlihat pada masa jayanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Semangat kerakyatan terungkap dalam bentuk musyawarah, permufakatan, gotong-royong, dan protes bersama terhadap kebijaksanaan para pemimpinnya yang dianggap tidak adil. Dan, semangat keadilan sosial juga terlihat, yaitu seperti diakuinya hak milik perorangan tetapi dibatasi oleh semangat kekeluargaan. Namun demikian, nilai-nilai yang terdapat dalam setiap kesatuan sosial itu belum merupakan satu kesatuan.

Setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, lebih-lebih menjelang Proklamasi Kemerdekaan, proses integrasi sosial tersebut tidak lagi bersifat sempit dan terbatas, melainkan berkembang ke arah integrasi nasional. Dalam proses integrasi nasional, terutama setelah kesatuan-kesatuan sosial, golongan-golongan, maupun kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik, mempunyai keinginan bersama untuk membentuk negara merdeka, mereka merasakan perlunya dasar falsafah, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Dasar falsafah itu dianggap perlu, karena negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan hanya akan berfungsi dengan baik apabila terdapat suatu gambaran yang jelas tentang hakikat, dasar dan tujuannya. Lagi pula dasar falsafah itu akan menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kesatuan-kesatuan sosial, golongan-golongan, kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik. Setelah melalui proses permusyawaratan yang panjang antara para tokoh masyarakat yang duduk dalam BPUPKI, dan kemudian dilanjutkan oleh para tokoh masyarakat yang duduk dalam PPKI, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 tercapai suatu konsensus, yaitu ditetapkannya Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar falsafah atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsensus itu dicapai tidak hanya karena semua pihak secara mendalam menyadari perlunya persatuan, melainkan juga karena Pancasila memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para warga maupun kesatuan-kesatuan sosial, golongan-golongan, kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik yang ada pada waktu itu. Dengan perkataan lain, Pancasila dapat diterima oleh semua pihak karena memuat nilai-nilai bersama yang telah lama berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak kepribadian dan pergaulan hidup para warga masyarakat di Nusantara, sehingga masing-masing pihak melihat dan menerimanya sebagai miliknya sendiri. Karena Pancasila

merupakan konsensus para tokoh masyarakat, pemimpin pergerakan dan cendekiawan nasional, maka Pancasila merupakan perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu dijunjung tinggi bersama dan dibela selama-lamanya. Oleh karena itu, integrasi nasional ataupun proses persatuan dan kesatuan bangsa tidak berkonotasi etnis dan senantiasa menolak segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi suku, adat, kedaerahan, agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, maupun pelapisan sosial. Dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, maka konsep integrasi nasional ataupun persatuan dan kesatuan bangsa yang kita anut memberi kemungkinan berkembangnya kebhinnekaan dan sekaligus juga ketunggalikaan. Dengan demikian, dalam proses itu akan terjadi jalinan yang terus-menerus antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan. Atau, kebhinnekaan akan selalu memperkaya ketunggalikaan, dan sebaliknya ketunggalikaan memberi ruang bagi berkembangnya kebhinnekaan.

Namun demikian, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang hanya secara singkat dituangkan di dalam Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, belum sempat dijabarkan ke dalam peraturan hukum seluruhnya, dan juga belum tersosialisasikan sepenuhnya, sehingga belum pernah menjadi program yang membimbing perilaku semua warga masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu terjadi, karena setelah Proklamasi Kemerdekaan, seluruh kekuatan bangsa lebih dicurahkan untuk mengusir kaum penjajah yang berusaha menjajah kembali. Dalam keadaan itu, maka para warga masyarakat Indonesia lebih banyak tersosialisasi ke dalam kesatuan-kesatuan primordial yang telah mapan daripada lembaga-lembaga nasional yang belum fungsional. Karena setiap kesatuan primordial memiliki sistem nilai atau paham yang berbeda-beda, maka para warganya cenderung menafsirkan berbagai masalah nasional berdasarkan paham golongannya sendiri-sendiri, bahkan ada yang berusaha mengubah dan mengganti Pancasila dengan paham golongannya. Hal itu seringkali menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, seperti pertentangan-pertentangan Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan (SARA), bahkan konflik-konflik ideologis yang disertai dengan pemberontakan bersenjata, seperti pemberontakan PKI di Madiun, DI-TII, PRRI, Permesta, dan G-30-S/PKI.

Setelah peristiwa G-30-S/PKI dalam tahun 1965, timbul kesadaran bahwa faktor utama yang menyebabkan berkembangnya konflik-konflik yang bersifat SARA dan terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI, adalah karena praktek kehidupan negara tidak lagi didasarkan pada Pancasila. Kesadaran ini semakin mengkristal, sehingga membangkitkan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan mendukung Pancasila sebagai dasar yang paling asasi dalam menegara, berarti Orde Baru harus menempatkan manusia dalam posisi sentral, yaitu sebagai

pelaku dan sekaligus juga sebagai tujuan dalam menegara. Ini akan diwujudkan dengan pembangunan nasional, yaitu sebagaimana termaktub dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dan, dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional, Orde Baru pun telah menetapkan cara pandangnya sendiri, yaitu yang dituangkan dalam konsepsi nasional Wawasan Nusantara, yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, Orde Baru juga telah menetapkan serangkaian kebijaksanaan untuk menjaga kelestarian dan kemurnian pelaksanaan Pancasila. Kebijakan-kebijaksanaan itu dituangkan dalam berbagai peraturan hukum, yaitu yang utama adalah Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), atau yang lebih dikenal dengan akronim P-4. P-4 bukanlah tafsir Pancasila, melainkan merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan. Untuk mengusahakan agar P-4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, pemerintah telah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau yang lebih dikenal dengan singkatan BP-7. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BP-7 telah merumuskan kebijaksanaan dan menyelenggarakan pendidikan atau penataran P-4, serta mengkoordinasi pelaksanaan penataran P-4 yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Dengan semakin intensifnya usaha-usaha sosialisasi Pancasila dan P-4, ada kesan bahwa sejak bangkitnya Orde Baru hingga sekarang, proses integrasi sosial dan integrasi nasional ataupun proses persatuan dan kesatuan bangsa, cenderung semakin kokoh. Hal itu terlihat dari berbagai indikator, yaitu semakin luas dan meningkatnya partisipasi masyarakat, serta makin menguatnya stabilitas politik nasional. Selain itu, serangan langsung terhadap Pancasila, serta usaha-usaha mengubah dan mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, juga semakin berkurang. Bahkan, dari berbagai kelompok kepentingan, golongan dan partai-partai politik, semakin bermunculan pernyataan secara terbuka tentang penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Di samping itu, juga terlihat bahwa dengan semakin membudayanya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat luas, maka perbedaan-perbedaan suku, agama, ras dan pelapisan sosial, tidak lagi setajam seperti sebelum jaman Orde Baru. Dewasa ini, perbedaan-perbedaan suku, agama, ras dan pelapisan sosial, benar-benar makin silang-

menyilang, sehingga suatu keanggotaan kelompok kepentingan, golongan atau partai politik, juga bersifat silang-menyilang. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa perasaan dan ikatan setiap warga masyarakat sebagai *Satu Tubuh Bangsa* semakin kuat.

Seraya mensyukuri perkembangan yang semakin menggembirakan itu, kita tetap tidak boleh menjadi terlena, karena sebelum dan dalam usaha menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, ancaman-ancaman yang bersifat ideologis ataupun politis mungkin sekali tetap ada. Dari dalam masyarakat sendiri, mungkin sekali masih ada sementara warga ataupun kesatuan sosial yang belum dapat menempatkan secara proporsional nilai-nilai primordialnya, bahkan ada yang bergerak secara halus, terselubung dan radikal dalam memperjuangkan paham golongannya. Di masa-masa yang lalu, ancaman-ancaman itu terlihat dalam berbagai macam cara dan bentuk, seperti tuntutan-tuntutan agar jabatan-jabatan penting di daerah-daerah dipegang oleh putra-putra daerah yang bersangkutan. Ada juga sementara pihak yang hendak memaksakan nilai-nilai agama tertentu menjadi hukum kenegaraan, dan lain sebagainya. Sementara itu, dari kalangan pemerintah pun masih ada yang menafsirkan dan melaksanakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya secara tidak tepat, bahkan keliru dan salah sama sekali, sehingga justru menghambat proses integrasi sosial dan integrasi nasional atau proses persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya ada sementara pejabat yang memeras Pancasila menjadi satu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila itu pun masih diperas menjadi agama, dan agama yang dimaksud adalah agama tertentu. Ini antara lain terlihat dari adanya peraturan yang melarang saling berkunjung dalam hari raya agama tertentu. Di samping itu, juga ada pejabat yang menafsirkan "golongan ekonomi lemah" berdasarkan konotasi etnis, yang justru menghambat proses pembauran antarsuku dan etnis lainnya.

Adalah suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Kenyataan-kenyataan yang berbeda-beda tetapi satu sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," tidak dapat diingkari oleh siapa pun. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini, kiranya tidak dimaksudkan dan jelas tidak mungkin mampu menghilangkan kebhinnekaan tertentu, seperti keragaman suku, agama, ras dan golongan. Lagipula, proses integrasi sosial ataupun integrasi nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang berarti juga dalam kerangka pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, konsep integrasi sosial ataupun integrasi nasional kita bersifat terbuka, dalam arti tidak berkonotasi etnis dan menolak segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi suku, agama, ras maupun golongan dan pelapisan sosial lainnya.

SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dengan mengakui, menerima dan menghayati Pancasila sebagai dasar yang paling asasi dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka Pancasila juga merupakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensi utamanya adalah manusia menduduki tempat yang sentral dalam pembangunan nasional. Hal itu berarti bahwa pembangunan adalah dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia, atau manusia tidak hanya sebagai pelaku, tetapi sekaligus juga sebagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, sesuai dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka tujuan pembangunan nasional bukanlah hanya orang-orang, atau golongan-golongan tertentu saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan akhir yang hendak dicapai dengan pembangunan nasional adalah kesejahteraan manusia-manusia Indonesia secara lahir batin selengkap mungkin.

Konsepsi pembangunan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam pembangunan nasional tersebut merupakan konsepsi nasional Orde Baru. Hal itu ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya; atau hanya mengejar kepuasan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan dan sebagainya; melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Dan, pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup dan berkeadilan sosial.

Sebagai perwujudan dari konsepsi pembangunan nasional tersebut, sejak kebangkitannya, Pemerintah Orde Baru senantiasa berusaha menciptakan kesejahteraan rakyat, dan selalu ditingkatkan secara bertahap melalui Pelita I mulai tahun 1969 hingga sekarang yang kini telah memasuki Pelita IV. Dalam realisasinya, pencapaian kesejahteraan rakyat tersebut diwujudkan dengan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat, baik pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material untuk mengejar kemajuan lahiriah, maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan nonmaterial untuk menciptakan kepuasan batiniah. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut juga telah dikombinasikan dengan usaha-usaha pemberantasan kemiskinan, seperti pemberantasan kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, pengangguran, dan kepincangan-kepincangan lainnya.

Usaha-usaha penciptaan kesejahteraan rakyat tersebut semakin ditingkatkan dengan usaha menciptakan iklim pembangunan yang sehat guna merangsang seluruh rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Hal itu tampak semakin jelas dengan ditempatkannya asas pemerataan menjadi urutan pertama dalam Trilogi Pembangunan Nasional, serta dijabarkannya asas pemerataan dalam "Delapan Jalur Pemerataan" mulai Pelita III, yaitu: (1) pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Tumbuhnya kesadaran dari dalam diri manusia-manusia Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sangat penting, dan merupakan hal yang esensial dari perwujudan konsep pembangunan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam pembangunan nasional. Karena, dengan tumbuhnya partisipasi aktif tersebut akan memungkinkan bangsa Indonesia mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengembangkan dirinya sendiri, baik dalam rangka pendewasaan emosional, etis, estetis, intelektual, sosial dan ekonomi, maupun dalam rangka pendewasaan politiknya. Apalagi dengan semakin banyaknya masalah dan tantangan pembangunan di masa mendatang, pemerintah tidak akan mampu mengatasi dan menyelesaikannya secara sendirian. Lagipula, walaupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, pemberantasan kemiskinan dan tumbuhnya partisipasi menuntut digunakannya kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidaklah berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus dikuasai dan ditangani oleh pemerintah sendiri. Dengan pembangunan, pemerintah justru berkewajiban untuk mengarahkan dan menggerakkan pembangunan, sehingga nantinya usaha-usaha pembangunan dapat ditangani sendiri oleh masyarakat dengan baik.

Berdasarkan pemikiran bahwa terwujudnya kesejahteraan rakyat tergantung dari kemampuan manusia-manusia Indonesia sendiri, sejak awal pembangunan, Pemerintah Orde Baru telah berusaha meningkatkan kualitas hidup manusia-manusia Indonesia melalui serangkaian program pembangunan. Di antaranya, adalah dengan menetapkan program kependudukan. Melalui program ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam hasil sensus penduduk tahun 1961 dan 1971, bahwa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata, yaitu sekitar

60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% dari luas daratan Indonesia. Di samping itu, juga banyak penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah dan pulau-pulau yang keadaan alamnya tidak memungkinkan kehidupan yang lebih baik. Untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut, pemerintah telah menggalakkan program transmigrasi, program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), serta program Keluarga Berencana (KB). Dari program-program tersebut, terlihat bahwa hingga memasuki Pelita IV, terutama berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980, persentase penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Jawa cenderung semakin menurun, yaitu dari 65% dalam tahun 1961, turun menjadi 61,9% dalam tahun 1980. Sementara itu, terlihat juga bahwa mobilitas penduduk, terutama perpindahan penduduk dari daerah-daerah yang keadaan lingkungannya kurang menguntungkan ke daerah-daerah yang subur, cenderung semakin meningkat.

Di samping ditetapkan program-program kependudukan yang lebih bersifat kuantitatif, pemerintah juga telah menetapkan berbagai program kependudukan yang lebih bersifat kualitatif, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak. Program-program itu adalah berupa usaha-usaha peningkatan taraf kecerdasan, kesehatan dan gizi rakyat, serta pengembangan daerah-daerah pemukiman, pembangunan perumahan rakyat, dan pembinaan daya dukung lingkungan hidup. Usaha-usaha peningkatan kesehatan dan gizi rakyat dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, membangun banyak Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Usaha Kesehatan Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, serta pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan pembinaan kesehatan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, pemerintah telah mendirikan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) yang bertugas membangun rumah-rumah yang harganya relatif murah dan terjangkau oleh daya beli rakyat banyak, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya membangun rumah yang sehat. Sedangkan usaha pembinaan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan proyek-proyek penghutanan kembali, penghijauan hutan-hutan yang gundul, pemeliharaan daerah-daerah aliran sungai dan penataan kawasan industri.

Program-program kependudukan yang lebih bersifat kualitatif tersebut, terlihat juga telah menunjukkan hasil-hasil yang positif. Hal itu terlihat dari berbagai indikasi, yaitu antara lain persentase penduduk yang menderita sakit cenderung semakin menurun, misalnya angka kesakitan dalam tahun 1980 sekitar 5,5% dan dalam tahun 1981 turun menjadi 4,1%. Angka kematian bayi pun cenderung semakin rendah, yaitu angka kematian bayi laki-laki dalam tahun 1971 diperkirakan sebanyak 152 per seribu kelahiran, turun men-

jadi 117 per seribu kelahiran dalam tahun 1980. Angka kematian bayi perempuan dalam tahun 1971 sebanyak 128 per seribu kelahiran, turun menjadi 98 per seribu kelahiran dalam tahun 1980. Di samping itu, angka perkiraan umur harapan hidup penduduk Indonesia juga cenderung semakin meningkat, yaitu umur harapan hidup penduduk laki-laki yang semula hanya 45 tahun dalam tahun 1971, meningkat menjadi 51 tahun dalam tahun 1980. Dan, umur harapan hidup penduduk perempuan yang semula hanya 48 tahun dalam tahun 1971, meningkat menjadi 54 tahun dalam tahun 1980. Bahkan, dalam akhir Pelita III, angka harapan hidup penduduk Indonesia diperkirakan telah meningkat lagi menjadi 56 tahun.

Adanya kecenderungan semakin menurunnya angka kematian bayi dan semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia-manusia Indonesia semakin baik. Angka-angka tersebut, yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup, mempunyai hubungan erat, dan berkaitan erat pula dengan angka melek huruf. Semakin turunnya angka kematian bayi selama masa Orde Baru ini, menunjukkan bahwa selama itu telah terjadi perbaikan pelayanan kesehatan, keadaan lingkungan hidup, mutu pangan rakyat, dan mungkin sekali telah terjadi peningkatan kecerdasan rakyat. Demikian juga dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup, hal itu menunjukkan bahwa selama itu telah terjadi peningkatan kemampuan sosial ekonomi, perbaikan penyediaan makanan yang bergizi, peningkatan kesehatan para ibu dan anak, serta peningkatan pendidikan masyarakat. Jika kualitas hidup manusia-manusia Indonesia terus meningkat, maka harapan terjadinya manusia Indonesia seutuhnya atau terwujudnya manusia dan masyarakat Pancasila, bukanlah suatu hal yang mustahil.

Walaupun kecenderungan terwujudnya manusia dan masyarakat Pancasila semakin cerah, akan tetapi dalam proses pencapaiannya pun terdapat banyak masalah. Di antaranya, yaitu dalam pelaksanaan program kependudukan yang lebih bersifat kuantitatif, masih terdapat masalah keseimbangan antara kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungannya. Hingga kini, masih terlihat bahwa Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, khususnya Propinsi Lampung, masih tetap menjadi tujuan utama para migran dari pulau-pulau lainnya. Jika perpindahan penduduk itu masih terus berlangsung, maka keseimbangan antara kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungannya akan semakin timpang, sehingga dapat menghambat usaha-usaha peningkatan kesejahteraan penduduknya. Lagipula, sebagian besar para migran yang masuk ke Pulau Jawa ternyata menuju ke kota-kota yang juga menjadi tujuan utama perpindahan penduduk desa-desa Pulau Jawa sendiri. Ini semua dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran, timbulnya persaingan yang tajam dalam mencari pekerjaan, bahkan tidak mustahil terjadinya konflik dan pergolakan politik.

Dalam usaha peningkatan kualitas hidup rakyat, juga masih menghadapi banyak masalah. Di antaranya, adalah bahwa dalam Pelita III, terdapat 9 juta anak Balita yang kekurangan kalori dan protein, 1,5 juta anak usia pra-sekolah yang kekurangan vitamin A, serta 41 juta orang yang kekurangan zat besi dan 1,3 juta orang kekurangan yodium. Data tersebut menunjukkan bahwa hingga Pelita III masih banyak penduduk yang kekurangan gizi, padahal gizi merupakan zat yang amat penting bagi pertumbuhan jasmani manusia, termasuk pertumbuhan otaknya. Oleh karena itu, jika mereka yang kekurangan gizi tersebut tidak dapat teratasi, mungkin sekali mereka akan mudah terserang penyakit, prestasi belajarnya rendah, dan bahkan semangat hidup, motivasi, dan produktivitas kerjanya rendah, serta apatis dan reaksinya terhadap perubahan-perubahan pun akan lamban. Orang-orang seperti itu mungkin sekali hanya akan menjadi objek pembangunan dan mudah sekali terserang goncangan masa depan, baik akibat pembangunan itu sendiri maupun perubahan-perubahan lainnya yang cenderung semakin cepat.

Di samping itu, walaupun indeks mutu hidup penduduk Indonesia, yang mencakup angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka melek huruf, cenderung meningkat, akan tetapi terdapat perbedaan yang relatif besar antara indeks mutu hidup masyarakat kota dan indeks mutu hidup masyarakat pedesaan. Selama dasawarsa 1971-1980, tercatat bahwa indeks mutu hidup masyarakat kota sebesar 59 dalam tahun 1971, dan meningkat menjadi 69 dalam tahun 1980, sedangkan indeks mutu hidup masyarakat pedesaan sebesar 41 dalam tahun 1971, dan meningkat menjadi 53 dalam tahun 1980. Hal itu menunjukkan bahwa hingga Pelita III tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta tingkat kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan masyarakat pedesaan masih lebih rendah daripada masyarakat kota. Dan, ada kesan bahwa ketimpangan-ketimpangan itu juga terjadi di kota-kota, yaitu terlihat dari perbedaan yang menyolok antara kampung-kampung miskin dan pemukiman-pemukiman yang mewah. Hal itu juga menunjukkan bahwa selama ini masih banyak warga masyarakat yang kurang, ataupun belum menikmati hasil-hasil pembangunan. Itu semua dapat menimbulkan banyak orang yang merasa terasing dan tidak memiliki, karena mereka tidak merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Di samping itu, rendahnya tingkat sosial ekonomi dan sosial budaya, apalagi dihadapkan dengan ketimpangan-ketimpangan yang menyolok, mudah menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial, seperti pencurian, penodongan, perampokan dan pembunuhan, bahkan tidak mustahil hidupnya kembali komunisme dan munculnya paham-paham lainnya, serta terjadinya pergolakan politik, seperti demonstrasi, kerusuhan dan serangan bersenjata.

Lagipula, walaupun indeks mutu hidup rakyat Indonesia cenderung meningkat, akan tetapi tingkatannya masih jauh di bawah indeks mutu hidup

rakyat negara-negara ASEAN lainnya, apalagi dibandingkan dengan negara-negara maju. Indeks mutu hidup rakyat Indonesia yang masih rendah tersebut, merupakan indikator bahwa tingkat sosial ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia masih lebih rendah daripada negara-negara tersebut. Hal itu juga merupakan indikasi bahwa besar kemungkinannya ketahanan nasional bangsa kita pun lebih rendah daripada ketahanan nasional mereka. Jika pertumbuhan indikator-indikator tersebut masih tetap lebih rendah daripada negara-negara tersebut, maka kita, baik orang-orang secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan bangsa, akan kurang dapat memanfaatkan kemajuan-kemajuan, bahkan mungkin sekali akan selalu kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

PENUTUP

Dari pembahasan tentang Pancasila Dalam Pembangunan Sosial Budaya tersebut di atas, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pembangunan sosial budaya merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya juga berdasarkan pada Pancasila. Hal itu berarti bahwa nilai-nilai Pancasila juga menjadi norma-norma yang tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya. Sebagai konsekuensi utamanya adalah bahwa pembangunan sosial budaya senantiasa berorientasi pada manusia, yaitu dengan menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh, yakni yang martabat dan hak-hak dasarnya dijunjung tinggi. Atau, dengan perkataan lain bahwa pembangunan sosial budaya selalu memberi kemungkinan kepada setiap warga negara Indonesia hidup secara wajar sebagai manusia, serta mampu mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir-batinnya selengkap mungkin. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya harus berarti membangun masyarakat menjadi masyarakat manusiawi, yaitu suatu masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi setiap warganya dijunjung tinggi dan tersedia secukupnya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup, yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Masyarakat yang demikian itu, juga memandang bangsa-bangsa lain sebagai sesama manusia dan bekerjasama untuk menciptakan dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

P-4 merupakan salah satu sarana pengembangan nilai dan norma-norma Pancasila harus mampu berperanan sebagai sarana pembudayaan dan pemsyarakatan nilai dan norma-norma itu ke dalam kehidupan masyarakat bangsa. P-4 harus mampu menanamkan dan mengembangkembangkan nilai dan norma-norma itu sebagai pegangan dan penuntun sikap dan perilaku se-

tiap anggota masyarakat. Hasil yang ingin diperoleh dari proses ini adalah sikap dan perilaku semua manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila seperti yang telah dijabarkan secara material dalam 36 butir P-4. Semakin kuat nilai dan norma-norma itu terwujud dalam sikap dan perilaku hidup masyarakat sehari-hari akan berarti semakin mantap proses kebudayaan dan pemasyarakatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Dengan cara ini nilai dan norma Pancasila sebagai jiwa kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia dapat juga berperanan sebagai filter yang mampu menyeleksi pengaruh-pengaruh negatif kebudayaan baik yang berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri maupun yang berasal dari luar negeri.

Pendidikan nasional kita bermaksud membentuk manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap berwawasan kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu pendidikan keilmuan dan teknologi serta humaniora harus mendapat porsi yang sama besar dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Disadari bahwa apabila keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat bangsa Indonesia sudah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal melaksanakan pendidikan moral dan etika, seperti budi pekerti, agama, maka prioritas materi kurikulum di sekolah-sekolah dapat lebih diberikan kepada pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu humaniora lainnya yang tidak dapat diajarkan sendiri oleh keluarga. Namun hingga saat ini rupanya harapan ini belum dapat dilaksanakan mengingat masih sebagian besar kehidupan keluarga di dalam masyarakat bangsa kita belum mampu melaksanakannya. Tentu pada saatnya nanti kita yakin bahwa pendidikan budi pekerti, agama dan pendidikan moral lainnya seharusnya dapat dilakukan sendiri di dalam lingkungan keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar yang paling asasi dalam menegara, berarti pula bahwa proses integrasi sosial dan integrasi nasional ataupun proses persatuan dan kesatuan bangsa juga berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa proses integrasi sosial dan integrasi nasional harus bertitik-tolak dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal itu berarti bahwa integrasi sosial dan integrasi nasional tidak berkonotasi etnis, serta menolak segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi suku, agama, ras maupun golongan. Adalah suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kenyataan adanya perbedaan-perbedaan tetapi bersatu dalam satu kesatuan, tidak dapat disangkal oleh siapa pun juga. Pembangunan nasional yang kini sedang di giatkan jelas tidak dimaksudkan dan tidak mungkin mampu menghilangkan kebhinnekaan tertentu, seperti keragaman suku, agama dan ras. Oleh karena itu, proses integrasi sosial ataupun integrasi nasional senantiasa memberi

kemungkinan berkembangnya kebhinnekaan dan sekaligus juga hidupnya ketunggalikaan. Dengan demikian, maka dalam proses itu akan selalu terjadi interaksi ataupun jalin-menjalin antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan.

Sebagai perwujudan dari konsepsi pembangunan sosial budaya yang menempatkan manusia pada posisi sentral, Pemerintah Orde Baru senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan bentuk, yaitu antara lain dengan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat, baik yang berupa kebutuhan material untuk mengejar kemajuan lahiriah, maupun kebutuhan nonmaterial untuk memenuhi kepuasan batiniah. Di samping itu, juga telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, yaitu dengan usaha pemberantasan kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, serta pelestarian dan peningkatan kemampuan lingkungan hidup. Dari berbagai usaha tersebut, baik berdasarkan ukuran GNP maupun Indeks Mutu Hidup, terlihat bahwa tingkat kesejahteraan ataupun kualitas hidup masyarakat Indonesia selama era Orde Baru, cenderung semakin meningkat. Namun demikian, perlu diketahui juga bahwa pembangunan sosial budaya masih menghadapi banyak masalah, seperti masalah pemerataan pembangunan, kekurangan gizi, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Akan tetapi, masih banyaknya masalah tersebut bukanlah berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah gagal. Betapapun berhasilnya pembangunan, jelas tidak akan mungkin mampu mengatasi dan menyelesaikan seluruh masalah secara tuntas dan sempurna. Adanya berbagai masalah pembangunan tersebut, merupakan tanggung jawab kita bersama dan justru karena itu maka pembangunan nasional perlu ditingkatkan terus-menerus. Sebagaimana ditegaskan dalam GBHN bahwa "berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia."